ELIT STRATEGIS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR RIAU TAHUN 2013

Buldani

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Strategic Elite in The Local Elections of Governor and Vice Governor of Riau Province in 2013. Decreased levels of community voters in local elections Governor and vice Governor of Riau in Kampar Kiri. This certainly see action taken by the character in the Kampar Kiri to encourage people to use their right to vote in local elections. So figure that has position and influence in the community referred to as elite. So the elite are people who are successful and have positions in society. The purpose of this study is to find out who called elite of the study sites and analyze the role of elites in urging people to vote. The result showed that the lack effort made by the elite in Kampar Kiri encouraging people to vote in local election Governor dan Vice Governor are underway. There are only a few elite who sought but not yet public awareness to choose and also from the elite do not understand his duties and functions as an elite who have positions and responsibility to the community in terms of selection. Then the elite assume that those responsible at the time of the local elections is the government and organizers.

Abstrak: Elit Strategis dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013. Menurunnya tingkat pemilih masyarakat Kampar Kiri pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Hal ini tentu melihat upaya-upaya yang dilakukan dan tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh untuk mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya pada waktu pemilihan. Maka tokoh yang mempunyai jabatan dan pengaruh ditengah masyarakat yang disebut sebagai elit strategis. Elit merupakan orang-orang yang berhasil dan mempunyai jabatan ditengah masyarakat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa yang disebut sebagai elit di lokasi penelitian dan menganalisa peran elit dalam mengajak masyarakat untuk memilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kampar Kiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang peran yang dilakukan oleh elit yang ada di Kampar Kiri dalam upaya mendorong masyarakat Kampar Kiri untuk memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Riau belangsung. Hanya ada beberapa elit saja yang berupaya tetapi belum menyentuh pada kesadaran masyarakat untuk pemilihan serta ada juga dari elit tersebut belum memahami tugas dan fungsi ia sebagai elit yang mempunyai jabatan dan tanggung jawab kepada masyarakat dalam hal pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, serta ada elit menganggap bahwa yang bertanggung jawab pada waktu pemilihan adalah pemerintah dan pihak penyelenggara.

Kata Kunci: elit strategis, Pilkada, kesadaran masyarakat

PENDAHULUAN

Demokrasi secara sederhana berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih kompleks, demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik, sementara pengisian jabatan-jabatan publik dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih. (Budiyanto, 2006).

Sistem demokrasi telah membuka ruang yang lebih besar kepada setiap warga negara untuk terlibat lebih aktif di arena politik. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut prinsip demokrasi langsung, maka hal ini berarti adanya

kesempatan kepada semua rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti Pemilihan Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis dalam rangka menciptakan pemerintahan daerah yang efektif melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, maka seluruh lapisan masyarakat daerah berhak dan perlu mendapat ruang keterlibatan yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun dilakukan melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka.

Keterlibatan masyarakat tersebut terlihat pada aspek partisipasi penggunaan hak pilih dalam pilkada, hampir sama dengan pemilihan

presiden dan wakil presiden. Semua lapisan masyarakat berkesempatan untuk menentukan hak pilih. Namun kenyataan masyarakat lebih tidak memilih ketimbang menggunakan hak pilihnya. Menurunnya angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, selain kemungkinan besar disebabkan rendahnya frekuensi sosialisasi pilkada oleh KPU dan kampanye yang dilakukan oleh para calon, juga bisa disebabkan oleh faktor apatis masyarakat melihat pemilu sering dilakukan, namun perubahan yang dijanjikan oleh para calon tidak kunjung tiba. Pilkada di mata masyarakat hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan oleh segelintir elit lokal untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan.

Hampir setiap pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun kepala daerah, masyarakat yang mempunyai hak pilih mengalami penurunan dan rendahnya menggunakan hak pilih di tengah masyarakat karena berbagai alasan tertentu. Rendahnya partisipasi politik untuk menggunakan hak pilih menandakan suatu bentuk kekecewaan sebagian rakyat terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah, keterwakilan di parlemen, dan praktek korupsi dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu. Masyarakat tidak memiliki pilihan yang baik dan tepat terhadap partai-partai politik dan para kandidat pemimpin pusat dan daerah. Mereka dianggap tidak kompeten (mampu dan berguna) dan tidak dapat dipercaya dari berbagai janji-janji selama kampanye berlangsung. Masyarakat selama ini telah dibohongi dan dibodohi oleh janji politik yang dikomunikasikan oleh para kandidat untuk membawa daerahnya menuju perubahan yang lebih baik. Selain itu, secara ideologi, masyarakat yang kritis tidak akan percaya begitu saja dengan sistem demokrasi yang dipakai pemerintah.

Banyaknya angka tidak memilih atau golongan putih (golput) perlu diwaspadai sebagai kegagalan demokrasi. Inilah kesimpulan *focus group discussion* yang dipandu oleh Ganjar Kurnia, Rektor Universitas Padjadjaran (2008), Zulriska berpendapat bahwa adanya kebosanan publik untuk berpartisipasi dalam pemilu juga harus dicermati. Menanggapi tingginya angka golput, ia menggunakan adanya ketidakpuasan mas-

yarakat terhadap figur calon pemimpin sebagai salah satu faktor penyebab golput. Lebih lanjut Zulriska mengungkapkan bahwa golput merupakan perilaku yang timbul akibat adanya kekecewaan rakyat. Penyebab golput sendiri, menurut Mariana, memiliki variabel yang tidak homogen.” Adanya banyak alasan mengapa seseorang memilih golput, diluar masalah administrasi seperti pendataan, bisa jadi masalah ideologi”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa saja yang disebut sebagai elit strategis di lokasi penelitian dan menganalisa peran elit dalam mengajak masyarakat ikut memilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pertimbangan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda dan pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah, dengan membedahkan dan mengguliti serta mengenal masalah-masalah selanjutnya mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktik-praktik yang terjadi, terutama tentang peran elit pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau putaran kedua Tahun 2013. Untuk pengambilan data dengan menggunakan dua orang *key informan* untuk menjawab pertanyaan wawancara masing-masing elit di lokasi penelitian di ambil dua kunci informan, yaitu dari elit agama, elit budaya/adat, kepala desa, ketua pemuda dan penghubung antara tim sukses dengan masyarakat.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta yang saling berhubungan serta bukan hanya mencari kebenaran mutlak, tetapi pada hakikatnya mencari

pemahaman observasi (Sugiyono, 2009). Penelitian kualitatif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti, karena sifatnya penelitian kualitatif tidak berusaha untuk menguji hipotesis (Idrus, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilkada yang telah berlangsung di Provinsi Riau tanggal 4 September 2013 yang lalu, mengusung 5 (lima) calon kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Seharusnya berlangsung dengan satu putaran pemilihan, namun kenyataannya membuat pemilihan diadakan 2 (dua) kali putaran yang berlangsung tanggal 29 November 2013. Ini menjadi sebuah pertanyaan kepada masyarakat Provinsi Riau dan Kepada pemerintahan daerah Provinsi Riau dan daerah-daerah Kabupaten di Riau mengapa masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya sebagai masyarakat Riau yang berbudaya Melayu seharusnya masyarakat ikut serta langsung untuk memilih para pemimpin untuk daerah Riau, hampir separoh dari jumlah daftar pemilih di Riau yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai masyarakat Riau. Menurunnya kesadaran masyarakat Riau untuk menggunakan hak pilihnya, dari pada memilih lebih baik bekerja ini merupakan anggapan masyarakat serta kepercayaan masyarakat kepada pemimpin semakin berkurang, apakah ini diakibatkan dari perhatian Kepala Daerah Riau semakin kurang, banyaknya para pejabat yang melakukan tindakan Korupsi ataukah kurangnya sosialisasi politik pemerintahan daerah Riau serta pendidikan politik yang masih relatif rendah kepada masyarakat.

Masyarakat yang mempunyai hak pilih pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Riau adalah 4.000.459 orang Daftar Pemilih Tetap. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 yaitu 2.452.569 atau 61,31% Pemilih dari 4.110.639 daftar pemilih Tetap Provinsi Riau, Jumlah Suara Sah 2.376.893 Pemilih, Suara Tidak sah 75.730 Pemilih.

Tidak sedikit masyarakat yang apatis terhadap golput pemilu di provinsi Riau, umumnya masyarakat yang apatis dikarenakan siapapun dan partai apapun yang menang, kehidupan

mereka tidak berubah dan bahkan kehidupan mereka bertambah miskin. Sehingga golongan masyarakat ini lebih bekerja dari pada libur untuk mencontreng. Angka masyarakat yang apatis semakin tinggi, dikeranakan banyaknya politisi partai yang mementingkan kepentingan pribadi dan partainya dari pada kepentingan masyarakat. Ketika menjelang pemilu, para petinggi partai gencar menghabiskan puluhan bahkan ratusan miliar untuk iklan janji dan janji. Namun ketika berkuasa, mereka membuat kebijakan yang menghasilkan keuntungan partai.

Pemilihan berlangsung 2 (dua) kali putaran dikarenakan belum memenuhi angka mutlak yang menjadi aturan jumlah suara pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagai masyarakat yang sudah terdaftar untuk menggunakan haknya sebagai bentuk partisipasi, sehingga akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau memutuskan dari 5 (lima) calon kandidat yang tersisa hanya menjadi 2 (dua) pasangan yang memenuhi syarat untuk melaju pada putaran ke-2 (dua) yaitu pasangan Drs. Herman Abdullah, MM dan H. Agus Widayat, MM. Annas Maamun-Ir. H. Arsyad Juliandi Rachman, MBA. Dengan rincian hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2013 Putaran I dan Ke-II (dua) di Kecamatan Kampar Kiri

Kecamatan Kampar Kiri merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar merupakan kecamatan yang kurang diperhatikan oleh Kabupaten Induk untuk pembangunan, baik secara Infrastruktur maupun secara Sumber Daya Manusia, bahkan masyarakat beranggapan bahwa Kampar Kiri merupakan kecamatan yang dianaktirikan, artinya ada perbedaan perlakuan yang kurang adil terhadap kecamatan ini.

Masyarakat Kampar Kiri mempunyai karakteristik homogen baik secara agama dan budaya yaitu beragama Islam terkecuali para masyarakat pendatang dari daerah lain yang beragama non-Islam, mempunyai adat istiadat yang kental sesuai dengan budaya lokal setempat, bahkan di setiap desa memiliki persukuan dan nama persukuan yang berbeda dengan desa yang lainnya, apalagi masyarakat Kampar kiri sangat menjunjung tinggi serta menghargai petuah petinggi negeri seperti Kepala Suku, ninik mamak

persukuan masing-masing, orang-orang yang menjadi tokoh penting dan berpengaruh seperti tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh adat, dan tokoh pemuda.

Jumlah masyarakat yang telah terdaftar untuk menggunakan hak suara pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan wakil Gubernur berjumlah 20.321 Pemilih dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) 53 TPS, masing-masing TPS tersebar di setiap desa-desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara di Kecamatan Kampar Kiri Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013, dengan jumlah suara sah 11.040, 207 suara dan 11.247 merupakan kumpulan suara sah dan tidak sah, dari 20.321 Ribu Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di Kampar Kiri. Sementara pemilihan pada putaran kedua ditingkat Kecamatan Kampar Kiri jumlah suara sah 9.734 suara dan jumlah suara tidak sah 126 suara, jumlah suara sah dan tidak sah 9.860.

Dari masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri merupakan salah satu kecamatan yang sangat menurun tingkat pemilih yang menggunakan hak pilih di dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Jumlah desa yang ada di Kampar Kiri berjumlah 20 desa, yang terdaftar jumlah pemilih 20.321 orang, dari 20.321 yang terdaftar hanya yang menggunakan hak pilih pada putaran I (pertama) berjumlah 11.247 suara atau 55% suara. Sedangkan pada putaran II (ke-dua) yang menggunakan hak pilih 9.860 Suara atau 48% suara dari total pemilih. Hal ini menunjukkan adanya penurunan pada pemilihan putaran kedua dibandingkan pemilihan pada putaran pertama, seharusnya jumlah pemilih pada putaran ke-dua meningkat dari pada putaran pertama yaitu selisih berjumlah 1.387 suara yang menurun hak pilihnya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013.

Pareto dalam Varma (2007) percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah mereka selalu mereka yang terbaik. Merekalah

yang dikenal dengan elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu umumnya datang dari kelas yang sama yaitu orang-orang yang kaya dan juga pandai, yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya.

Karena itu menurut Pareto, masyarakat terdiri dari 2 kelas: (1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi kedalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*), (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit.

Teori elit misalnya menegaskan bahwa ialah yang mendasarkan pada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi ke dalam dua kategori yang luas yang mencakup: (a). Sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan (b). Sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah (Sitepu, 2012).

Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah yang tercermin nilai-nilai demokrasi cenderung lebih nyata karena dalam sistem Pilkada Langsung yang dilaksanakan berdasarkan enam asas yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, rakyat daerah akan memiliki kesempatan yang lebih luas dan bebas dalam mengaktualisasikan sekaligus memperoleh pengakuan atas hak politiknya secara politik secara langsung.

Pilkada langsung sesungguhnya tercantum pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang menegaskan bahwa Pilkada dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Prihatmoko, 2004).

Di dalam UU No.22 Tahun 1999 disebutkan syarat-syarat menjadi Kepala Daerah sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan yang sah
- c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan penghianatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas/atau sederajat
- e. Berumur sekurang-kurangnya tiga puluh tahun
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri
- j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya
- k. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia dicalonkan menjadi kepala daerah (Kaloh, 2004).

Penelitian ini melakukan wawancara yang merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan untuk memastikan dan memperkuat fakta yang diperoleh melalui kuesioner/wawancara sebelumnya yang berkaitan dengan upaya elit mengajak masyarakat untuk memilih dalam Pilkada Provinsi Riau tahun 2013 di pedesaan yang ada di Kecamatan Kampar Kiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh sentral di Kampar Kiri sebagai elit yang mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku pemilih masyarakat, maka dapat dianalisa dari pernyataan-pernyataan serta pendapat para elit dalam hubungannya dengan Pilkada tahun 2013. Dapat diketahui bahwa dari pernyataan masing-masing tokoh dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Tokoh agama dengan apa yang disampaikan lewat ceramah dan khutbah Jum,at melalui

wawancara dapat diketahui bahwa selaku penasehat keagamaan sudah menyampaikan dan sudah mengajak masyarakat untuk memilih dan menghindari *money politics* karena tindakan tersebut menyalahi dari ketentuan agama.

2. Kepala desa sebagai pemimpin desa sudah mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih, baik pada acara pertemuan-pertemuan maupun acara-acara yang lainnya. Namun hal itu selaku pihak pemerintahan desa tidak banyak berbuat apa-apa karena kepala desa tidak diperbolehkan untuk berpolitik secara praktis.
3. Tokoh adat sebagai pemimpin adat yang di daerah setempat belum mengajak masyarakat untuk memilih karena tidak ada wewenang dan mandat yang diserahkan oleh pihak penyelenggara pemilu.
4. Tokoh pemuda seharusnya banyak berbuat untuk kemajuan masyarakat, namun tidak dapat pula menggunakan fungsinya sebagai penggerak masyarakat pemuda. Maka peran ia sebagai pemuda belum banyak berbuat untuk mendukung serta mendorong pemuda untuk memilih.
5. Berdasarkan penjelasan dari masing-masing tim sukses kandidat calon dapat di analisa bahwa tim sukses H. Herman Abdullah dan Agus Widayat telah melaksanakan tugas ia sebagai tim penghubung calon dengan masyarakat kampar Kiri. Tetapi tim sukses anas Maamun dan Arsyad Juliandi belum melaksanakan tugas sebagaimana tidak adanya koordinasi serta kerjasama tim sukses dengan tim yang lain.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa melalui analisa hasil wawancara dengan elit yang ada di Kampar Kiri masih kurang berperan dengan baik untuk mengajak masyarakat memilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013, hal tersebut berindikasi pada menurunnya jumlah pemilih pada waktu pemilihan pada putaran kedua di Kampar Kiri.

SIMPULAN

Elit yang ada di Kecamatan Kampar Kiri

yang paling dominan mengajak masyarakat untuk memilih adalah elit agama yaitu ulama/ustad, ia sebagai penasehat agama kepada masyarakat dan juga menyampaikan ajakan kepada masyarakat untuk memilih melalui khutbah jum'at, pengajian-pengajian atau wirid yasinan majlis taklim serta acara pertemuan-pertemuan dengan masyarakat yang bersifat agama pada waktu pemilihan kepala daerah. Serta kepala desa, kepala desa sebagai kepala pemerintahan di Kecamatan Kampar Kiri sudah mengajak masyarakatnya untuk melakukan pemilihan, ajakan tersebut dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dengan beberapa perangkat desa dan acara-acara tertentu yang mendatangkan masyarakat setempat.

Selanjutnya elit yang kurang dominan untuk mengajak masyarakat untuk memilih adalah ketua pemuda dan elit adat. Masing-masing elit ini belum sepenuhnya menjalankan tugas dan tanggung kepada masyarakat dalam hal pemilihan. Mereka hanya pasif dalam hal pilkada disebabkan karena mereka belum tahu tentang hal soal ajakan mas-

asyarakat untuk memilih serta yang bertanggung jawab tentang pemilihan adalah pihak penyelenggara.

DAFTAR RUJUKAN

- Budiyanto, 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga
- SP. Varma, 2007. *Teori Politik Modern*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kaloh, J. 2003. *Kepala Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sitepu, P. Anthonius, 2012. *Teori-teori Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Joko J Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah: Filosofi, Sistem dan Problema*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya